



Pemerintah Provinsi Gorontalo

2025



LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

**Dinas Koperasi UKM Perisindustrian dan Perdagangan
Provinsi Gorontalo**

Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025** dapat diselesaikan dengan baik.

LPPD ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya pada bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, serta perdagangan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengacu pada dokumen perencanaan daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Laporan ini memuat gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, penggunaan anggaran, serta permasalahan dan upaya penyelesaian yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2025. LPPD ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif atas kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM, pengembangan sektor industri, serta stabilisasi dan kelancaran distribusi perdagangan.

Selain sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, LPPD ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kebijakan, program, dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya, serta sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

penyusunan laporan ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ke depan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LPPD ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Januari 2026
Kepala Dinas,

FAYZAL LAMAKARAKA, S.STP., MM
NIP. 197707151996121001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
A. Undang-Undang	1
B. Data Geografis Wilayah	2
a. Batas Administrasi Daerah	2
b. Luas Wilayah	2
c. Kondisi Topografis	3
C. Gambaran Umum Demografis	4
a. Jumlah Penduduk	4
b. Komposisi Penduduk	5
c. Komposisi Penduduk menurut Struktur Usia, Jenis Pekerjaan & Pendidikan	6
D. Jumlah Kabupaten/Kota	7
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah & Pegawai Pemerintah	8
a. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	8
F. Alokasi Anggaran dan Realisasi	11
2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	15
b. Visi dan Misi	18
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	19
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	31
3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	83
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	84
1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	84
2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	104
a. Target Kinerja Dalam Pencapaian Kinerja	104

b.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	109
c.	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	119
d.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	125
e.	Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	126
BAB III	TUGAS PEMBANTUAN	127
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	129
BAB V	PENUTUP	130



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Provinsi Gorontalo merupakan daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2001 pada tanggal 5 Desember 2000. Seiring dengan perkembangan daerah dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka dibentuk lagi dua kabupaten baru yakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. Akhirnya pada tahun 2007 berdasarkan UU RI Nomor 11 Tahun 2007 disahkan pembentukan satu kabupaten lagi yaitu Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan demikian hingga saat ini Provinsi Gorontalo terdiri dari lima kabupaten dan satu Kota.

Dari sisi potensi daerah, Provinsi Gorontalo memiliki keunggulan pada sektor pertanian, khususnya komoditas jagung, serta sektor perikanan, kelautan, UMKM, dan industri berbasis sumber daya lokal. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

A. UNDANG-UNDANG

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

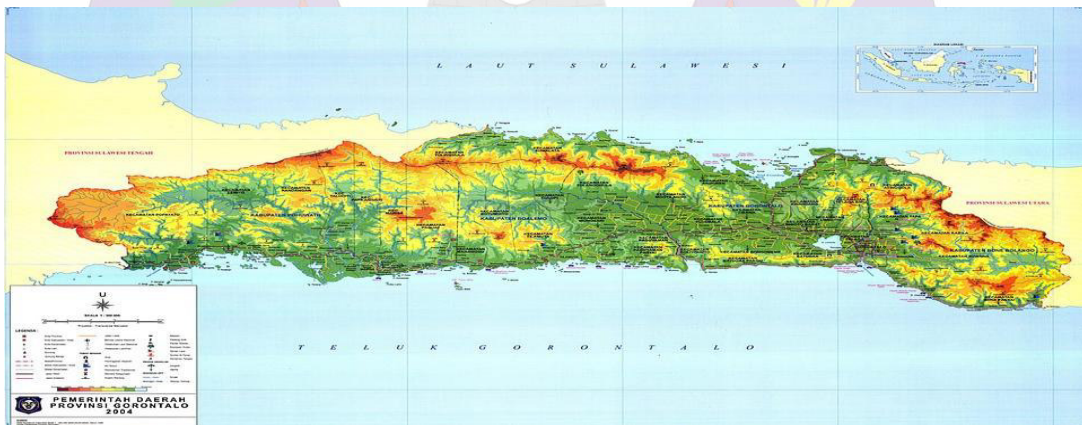
9. Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
10. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo
11. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029;

B. Data Geografis Wilayah

a. Batas Administrasi Daerah

Provinsi Gorontalo terletak antara $0^{\circ} 19' - 0^{\circ} 57'$ Lintang Utara dan $121^{\circ} 23' - 125^{\circ} 14'$ Bujur Timur. Wilayah provinsi ini berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, diantaranya Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini

Peta Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar berikut ini :



Gambar 1.1 : Peta Provinsi Gorontalo

b. Luas Wilayah

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022, luas daerah Provinsi Gorontalo sebesar 12.025,147 km². Apabila dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya

sebesar 0,64 persen. Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo. Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas area sebesar 36,34 persen, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo sebesar 0,59 persen.

Tabel 1.1 Luas dan Persentase Wilayah Provinsi Gorontalo

No.	Wilayah	Luas Wilayah (Km ²)	(%)*	Sumber Data
1.	Kab. Gorontalo	2 160,364	17,97	a. UU No. 29 Thn 1959, b. UU No. 50 Thn 1999 , UU No. 6 Thn 2003 c. UU No. 11 Thn 2007
2.	Kab. Boalemo	1 830,865	15,23	a. UU No. 50 Thn 1999 b. UU No. 6 Thn 2003
3.	Kabupaten Pohuwato	4 370,359	36,34	UU No. 6 Thn 2003
4.	Kab. Bone Bolango	1888,998	15,71	UU No. 6 Thn 2003
5.	Kab. Gorontalo Utara	1 703,628	14,17	UU No. 11 Thn 2007
6.	Kota Gorontalo	70,933	0,59	1. UU No. 29 Thn 1959 2. UU No. 22 Thn 1999
Provinsi Gorontalo		12 025,147	100	UU No. 38 Thn 2001

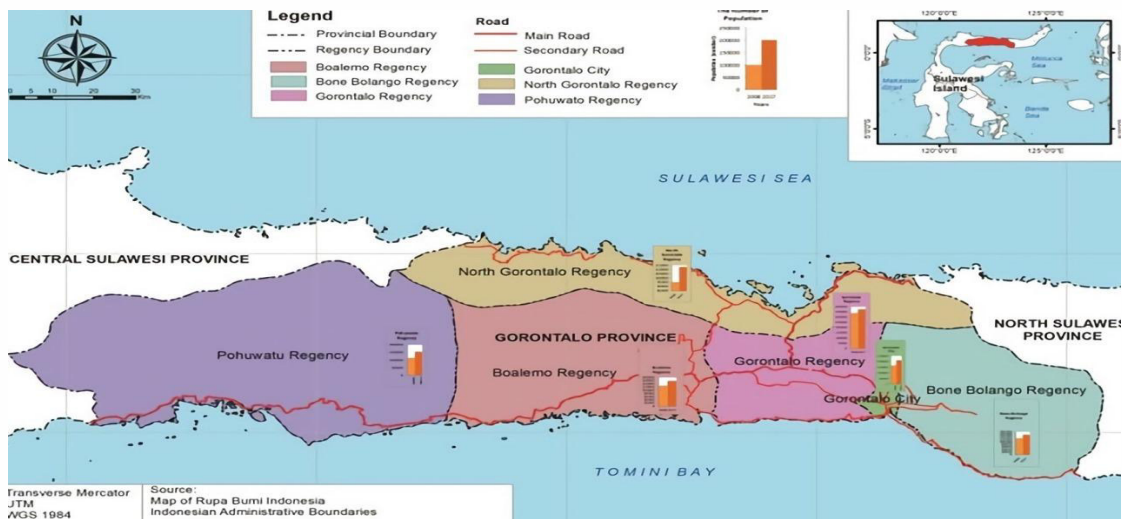
Sumber: BPS. Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2025

c. Kondisi Topografis

Permukaan tanah di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Oleh karenanya, provinsi ini mempunyai banyak gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda.

Permukaan tanah di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevansi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevansi bervariasi dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato terletak pada elevansi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango

mempunyai topografi dengan ketinggian berbeda-beda dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut.



Gambar 1.2. Peta Topografi Provinsi Gorontalo

C. Gambaran Umum Demografis

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2020–2025 hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni), jumlah penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2025 sebanyak 1.242,24 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,18 persen dari tahun 2020. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Gorontalo sebesar 101,60 dengan jumlah laki laki sebanyak 626,06 ribu jiwa dan perempuan sebanyak 616,18 ribu jiwa.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo, 2023-2025

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Kab. Gorontalo	405.322	409.509	413.630
2	Kab. Boalemo	151.337	153.274	155.180
3	Kab. Pohuwato	151.850	153.770	155.670
4	Kab. Bone Bolango	168.556	170.649	172.730
5	Kab. Gorontalo Utara	130.722	132.784	134.850
6	Kota Gorontalo	205.395	207.808	210.190
Provinsi Gorontalo		1.213.182	1.227.794	1.242.240

Sumber: BPS. Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo tahun 2025 memiliki jumlah penduduknya lebih banyak, sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah yang terendah jumlah penduduknya dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo memiliki penduduk yang cukup besar setelah Kabupaten Gorontalo, hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo adalah wilayah

terpadat penduduknya di Provinsi Gorontalo dengan kepadatan penduduk Kota Gorontalo sebesar 2.963 jiwa/km² dan kepadatan terkecil berada di Kabupaten Pohuwato sebesar 36 jiwa/km².

b. Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2025 sebanyak 1.242.24 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Gorontalo sebesar 101,60 dengan jumlah laki-laki sebanyak 626.06 jiwa dan perempuan sebanyak 616.18 jiwa. Berdasarkan piramida penduduk, Provinsi Gorontalo kebanyakan dihuni oleh penduduk berumur 0-4 tahun dengan jumlah tiap kelompok umur diatas 100.000 jiwa.

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo, 2025

No	Kelompok Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 4	55.59	53.82	109.41
2	5 – 9	48.81	46.94	95.75
3	10 – 14	47.29	45.67	92.96
4	15 – 19	53.72	51.36	105.08
5	20 – 24	54.21	51.97	106.18
6	25 – 29	53.96	51.92	105.88
7	30 – 34	51.54	49.63	101.17
8	35 – 39	47.54	46.00	93.53
9	40 – 44	44.05	42.90	86.95
10	45 – 49	41.12	40.44	81.56
11	50 – 54	36.17	36.06	72.23
12	55 – 59	30.59	31.10	61.69
13	60 – 64	24.06	25.10	49.16
14	65 – 69	16.82	18.23	35.05
15	70 – 74	10.76	12.34	23.10
16	75+	9.84	12.70	22.54
Jumlah		626.06	616.18	1.242.24

Sumber :BPS Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2025

c. Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia, Jenis Pekerjaan dan Pendidikan

Pada tahun 2024, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja sebanyak 652.588 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,91 persen. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 632.184 jiwa, sedangkan penduduk yang menganggur sebanyak 20.404 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3.13% persen.

Tabel 1.4. Proyeksi Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Gorontalo tahun 2021-2024

Jenis Kegiatan Utama	2021	2022	2023	2024
I. Angkatan Kerja	596.968	630.534	651.425	652.588
1. Bekerja	579.009	614.250	631.521	632.184
2. Menganggur	17.959	16.284	19.904	20.404
II. Bukan Angkatan Kerja	308.393	284.417	268.848	280.338
1. Sekolah	64.609	61.506	62.447	71.823
2. Mengurus Rumah Tangga	200.250	180.088	169.968	172.122
3. Lainnya	43.534	42.823	36.433	36.393
Jumlah/Total	905.361	914.951	920.273	932.926
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,01%	2,58%	3.06%	3.13%

Sumber :BPS Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2025

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan 1,8 persen dibandingkan tahun 2023.

Berikut ini disajikan data penduduk menurut jenis kegiatan utama dan jenis kelamin di Provinsi Gorontalo :

Tabel 1.5. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Di Provinsi Gorontalo tahun 2024

Jenis Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Total
I. Angkatan Kerja	396.431	256.157	652.588
1. Bekerja	386.009	246.175	632.184
2. Penganggur	10.422	9.982	20.404
II. Bukan Angkatan Kerja	72.706	207.632	280.338
1. Sekolah	32.963	38.860	71.823
2. Mengurus Rumah Tangga	15.722	156.400	172.122
3. Lainnya	24.021	12.372	36.393
Jumlah/Total	469.137	463.789	932.926

Sumber :BPS Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2025

Dari uraian data diatas menyatakan data penduduk yang bekerja berdasarkan jenis kegiatan utama menurut jenis kelamin, menunjukkan bahwa jumlah laki-laki bekerja lebih tinggi daripada jumlah perempuan bekerja. Sementara jumlah pengangguran Laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Sama halnya ditahun sebelumnya.

Tabel 1.6. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2022-2024

Lapangan Pekerjaan Utama	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	204.305	188.127	190.768
Industri	105.492	112.317	114.456
Perdagangan	304.453	328.077	326.960
Total	614.250	631.521	632.184

Sumber :BPS Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2025

Pada tahun 2024, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja sebanyak 652.588 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,95 persen. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 632.184 jiwa, sedangkan penduduk yang menganggur sebanyak 20.404 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,13 persen.

Tabel 1.7. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2024

Status Pekerjaan Utama	2022	2023	2024
Berusaha Sendiri	143.237	151.566	170.080
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	97.883	109.126	88.018
Berusaha dibantu Buruh Tetap/buruh dibayar	17.490	19.020	19.023
Buruh/Karyawan/Pegawai	200.292	196.178	224.702
Pekerja Bebas di non pertanian	53.537	60.190	53.211
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	66.570	78.170	77.150
Jumlah	579.009	614.250	632.184

Sumber : Bps, Gorontalo Dalam Angka 2025

D. JUMLAH KABUPATEN/KOTA

Luas wilayah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022 luas daerah Provinsi Gorontalo sebesar 12.025,147 km². Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 1.830.865 km², Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.160,364 km², Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4370,359 km², Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1888,998 km², Kabupaten Gorontalo Utara 1703,628 km², dan Kota Gorontalo dengan luas wilayah 70,933 km².

E. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai.

Secara umum Sumber daya manusia/aparatur pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

a. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel 1.8. Keadaan Pegawai Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin *Per 31 Desember 2025*

No.	Unit Organisasi	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat	9	9	18
2	Bidang kelembagaan dan pengawasan	5	2	7
3	Bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha kecil	3	7	11
4	Bidang Industri	4	8	12
5	Bidang Perdagangan	6	7	13
6	UPTD BPSMB	5	12	17
JUMLAH		29	48	77

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2025

Data diatas menunjukkan proporsi pegawai di lingkup Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo lebih didominasi oleh pegawai perempuan dibandingkan dengan pegawai laki-laki. Dimana Jumlah pegawai perempuan mencapai 62,34% sedangkan pegawai laki-laki 37,67%. Konsentrasi pegawai terbanyak di sekretariat sebanyak 18 orang, kemudian diikuti oleh UPTD BPSMB 17 orang dan Bidang perdagangan 13 orang.

Berdasarkan proporsi tersebut diatas, maka penyebaran dan jumlah pegawai di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo telah memenuhi unsur kesetaraan gender dalam MDG's.

Adapun keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1.9. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2025

No	Unit Organisasi	SD	SMP	SMA	D 1,2,3	S1	S2	Jumlah
1	Sekretariat	-	-	5	2	8	4	19
2	Bidang kelembagaan dan pengawasan	-	-	-	1	4	2	7
3	Bidang Pemberdayaan dan penembangan koperasi usaha kecil	-	-	-	3	5	2	10
4	Bidang Industri	-	-	2	3	3	4	12
5	Bid. Perdagangan	-	-	3		8	2	13
6	UPTD BPSMB	-	1	-	2	11	2	16
JUMLAH		-	1	10	11	39	16	77

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2025

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo adalah jenjang S1 dan tidak ada pegawai yang berpendidikan SD. Adapun keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menunjukkan 50,65% berpendidikan S1. Kemudian untuk ASN yang memiliki jenjang pendidikan S2 sebesar 20,78%. Begitupun halnya dengan ASN yang memiliki pendidikan D1,D2,D3 sebesar 14,29%. Untuk jenjang pendidikan SMA ditahun 2025 sebesar 12,98% dan jenjang SMP sebesar 1,30%.

Berdasarkan data tersebut diatas maka pengembangan SDM Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo masih diperlukan dalam rangka penyiapan SDM yang handal dan professional, serta mendorong pegawai yang berpendidikan setara SMA dan Diploma untuk mengikuti pendidikan S1 sesuai keahlian. Meskipun telah terlihat adanya peningkatan dari pendidikan jenjang SMA ke S1.

Upaya meningkatkan jumlah PNS dengan kualifikasi jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus diikuti pula dengan upaya yang sistimatis terhadap kesesuaian disiplin ilmu dengan tupoksi OPD. Dengan begitu, pencapaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat ditingkatkan.

Tabel 1.10. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menurut Golongan Per 31 Desember 2025

No	Unit Organisasi	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	2	13	4	19
2	Bidang kelembagaan dan pengawasan	-	-	5	2	7
3	Bidang Pemberdayaan dan penembangan koperasi usaha kecil	-	-	9	1	10
4	Bidang Industri	-	1	7	4	12
5	Bid. Perdagangan	-	2	9	2	13
6	UPTD BPSMB	-	1	14	1	16
TOTAL		-	6	57	15	77

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2025

Berdasarkan tabel diatas maka keadaan pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo berdasarkan Golongan terdiri dari 7,8% golongan II, 74,03% golongan III dan 19,48 % golongan IV.

Tabel 1.11. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon Per 31 Desember 2025

No	Unit Organisasi	Eselon			Pejabat Fungsional	Staf	Jumlah
		II	III	IV			
1	Sekretariat	1	1	2	1	14	18
2	Bidang kelembagaan dan pengawasan	-	1	-	3	3	7
3	Bidang Pemberdayaan dan penembangan koperasi usaha kecil	-	1	-	3	7	11
4	Bidang Perindustrian	-	1	-	3	8	12
5	Bidang Perdagangan	-	1	-	3	8	12
6	UPTD BPSMB	-	1	3	6	6	16
TOTAL		1	6	5	19	46	77

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2025

Keadaan pegawai menurut eselon menunjukkan jumlah pejabat struktural yang mengisi struktur organisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo urusan wajib dengan komposisi pejabat eselon II sebanyak 1 orang (1,30%), pejabat eselon III berjumlah 6 orang atau 7,80 % dan pejabat eselon IV berjumlah 5 orang atau 6,50 %. Dari komposisi ini terlihat bahwa tenaga atau pejabat fungsional di lingkup Dinas Kumperindag pada urusan Koperasi & UKM tersedia sebanyak 19 orang untuk

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sejak tahun 2023 terdapat penambahan jumlah pejabat fungsional karena adanya penyetaraan jabatan dari struktur Esselon IV ke pejabat fungsional dan hingga 2025 belum ada penambahan pejabat fungsional.

F. ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 34 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penjabaran APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025, jumlah anggaran setelah perubahan TA. 2025 sejumlah Rp. 1.764.456.056.399,- dengan realisasi Rp. 1.642.975.615.310,72-

Adapun rincian alokasi anggaran pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 :

- a. Anggaran induk 2025 = Rp. 22.071.294.305,-
- b. Tahapan Revisi Anggaran : = Rp. 10.701.912.500,-
 - ~ Revisi Hasil pencadangan Anggaran = (Rp. 3.548.673.500,-)
 - ~ Revisi Pergeseran antar OPD = Rp. 225.000.000,-
 - ~ Pemanfaatan Efisiensi = Rp. 12.578.276.000,-
 - ~ Penyesuaian Pagu SKPD = Rp. 1.400.000.000,-
 - ~ APBD-P 2025 = Rp. 47.310.000,-

Dari total anggaran tersebut terdapat tagging Pemanfaatan IF TA 2025 ((IF Kinerja Tahun Sebelumnya) sebesar Rp. 6.703.030.000,-

Total anggaran setelah perubahan 2025 sejumlah Rp. 32.773.206.805,-.

Adapun uraian penjelasannya sebagai berikut:

Pagu dan Anggaran Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan TA. 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Sehingga total anggaran Dinas Koperasi UKM Perindustrian Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025 :

Pagu Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2025

- Belanja Operasi : Rp. 32.773.206.805-
 - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.976.439.505,-
 - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 22.129.306.100,-
- Belanja Modal : Rp. 667.461.200

✚ **Realisasi Anggaran :**

- Belanja Operasi : Rp. 28.806.278.960,-
 - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.597.812.304,-
 - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 18.544.250.909,-
- Belanja Modal : Rp. 664.215.747,-

Pagu dan Anggaran Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan TA. 2025 per urusan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Alokasi dan Realisasi Anggaran (Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar) Urusan KUKM (termasuk anggaran sekretariat)

Pagu Awal Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang terdiri dari 6 (enam) program berjumlah sebesar Rp.17.363.175.305,- Dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun anggaran 2025, urusan koperasi usaha kecil menengah melakukan revisi-revisi pada beberapa item belanja di 4 (empat) program dengan total sebesar Rp. 5.308.344.500,- dan pada APBD-P sebesar (Rp. 30.880.000,-) Sehingga di akhir tahun 2025 pagu anggaran urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melalui sumber dana APBD berjumlah sebesar Rp. 22.640.639.805,- dengan total realisasi sebesar Rp. 22.128.435.881,- dan silva Rp. 512.203.924,-

Total Anggaran Urusan KUKM (Wajib Bukan Pelayanan Dasar) Tahun 2025 :

✚ **Pagu setelah perubahan Tahun Anggaran 2025**

- Belanja Operasi : Rp. 22.640.639.805,-
 - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.976.439.505,-
 - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 11.996.739.100
- Belanja Modal : Rp. 667.461.200,-

✚ **Realisasi Anggaran**

- Belanja Operasi : Rp. 22.128.435.881,-
 - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.521.920.473,-
 - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 11.942.299.661,-
- Belanja Modal : Rp. 664.215.747,-

Dalam pelaksanaan kegiatannya di tahun 2025 pada urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, anggaran Rp. 4.993.030.000,- yaitu Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat berupa Stimulan Pengembangan Produk bagi UMKM dan Pendukung Lainnya pada Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi di tagging melalui sumber dana Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun Anggaran 2025 Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan Surat dari Gubernur Gorontalo tanggal 24 April 2025 tentang Rencana Penggunaan Dana Insentif Fiskal TA. 2025 Kinerja Tahun Sebelumnya Provinsi Gorontalo. Tagging anggaran ini tidak menambah total anggaran yang ada di urusan ini.

Pada proses revisi anggaran 2025 terdapat revisi anggaran dengan total Rp. 5.277.464.500,- termasuk revisi pencadangan anggaran OPD sebesar (Rp. 1.574.655.500,-) dan pemanfaatan efisiensi sesuai inpres I tahun 2025 sebesar Rp. 6.908.000.000,- antara lain pada item belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat serta belanja lainnya.

b. Alokasi dan Realisasi Anggaran (Urusan pilihan)

Urusan Perdagangan

Total Pagu setelah perubahan 2025 untuk urusan Perdagangan sebesar Rp. 5.542.965.000,- dengan realisasi Rp. 5.440.125.979,- (capaian fisik 97,63% dan keuangan 98,14%) dan silva Rp. 102.839.021,-

Ditahun 2025 untuk urusan perdagangan melaksanakan 4 (empat) program, 6 (enam) kegiatan. Pagu awal untuk urusan perdagangan ini sebesar Rp. 3.708.119.000,- kemudian terdapat revisi dengan total sebesar Rp. 1.834.846.000,-, yaitu pada program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebesar Rp. 3.106.507.500,- (Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat bertambah sebesar Rp. 2.919.000.000,- serta pada belanja lainnya); program pengembangan ekspor mengalami revisi pencadangan anggaran OPD pada DPA APBD 2025 sebesar (Rp. 136.538.000) yaitu pada item belanja sewa bangunan gedung kantor dan belanja perjalanan dinas biasa; dan pada program standardisasi dan perlindungan konsumen total revisi senilai (Rp. 1.135.123.500,-) termasuk revisi di tahapan APBD-P sebesar Rp. 79.390.000,-

Dalam pelaksanaan kegiatannya di tahun 2025 anggaran sebesar Rp.1.710.000.000,- di tagging melalui sumber dana IF, yaitu Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun Anggaran 2025 Provinsi Gorontalo (sebesar Rp. 1.710.000.000,- yaitu Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat berupa barang kebutuhan pokok dan pendukung lainnya pada kegiatan Operasi Pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Tagging anggaran ini tidak menambah anggaran pada sub kegiatan yang dimaksud.

Alokasi Anggaran dan realisasi pada Urusan Perdagangan :

Pagu dan realisasi (sumber dana APBD)

✚ *Pagu Tahun Anggaran 2025*

Pagu Awal = Rp. 3.708.119.000,-

Tambahan/revisi:

Revisi Pencadangan OPD 2025 = (Rp. 1.464.294.000,-)

Pemanfaatan Efisiensi = Rp. 1.710.000.000,-

(di tagging IF Tahun Anggaran 2025 (Kinerja Tahun Sebelumnya)

Penyesuaian Pagu OPD = Rp. 1.500.000.000,-

Finalisasi APBD-P 2025 = Rp. 79.390.000,-

Pagu Setelah Perubahan =

✚ Pagu Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2025 = Rp. 5.542.965.000,-

▪ Belanja Operasi : Rp. 5.542.965.000,-

~ Belanja Pegawai : Rp. -

~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 5.542.965.000,-

▪ Belanja Modal : Rp. -

✚ Realisasi Anggaran :

▪ Belanja Operasi : Rp. 5.440.125.979,-

~ Belanja Pegawai : Rp. -

~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 5.440.125.979,-

▪ Belanja Modal : Rp. -

c. Alokasi Anggaran dan realisasi pada Urusan Perindustrian

Pagu dan realisasi (sumber dana APBD)

✚ *Anggaran urusan industri setelah perubahan Tahun 2025*

▪ Belanja Operasi : Rp. 4.589.602.000,-

~ Belanja Pegawai : Rp. -

~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 4.589.602.000,-

▪ Belanja Modal : Rp. -

✚ Realisasi Anggaran :

▪ Belanja Operasi : Rp. 1.237.717.100,-

~ Belanja Pegawai : Rp. -

~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 1.237.717.100,-

▪ Belanja Modal : Rp. -

Tahun 2025 urusan Perindustrian mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 1.323.884.000,- termasuk tambahan melalui pemanfaatan efisiensi sesuai Inpres I Tahun 2025.

2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan pada Permendagri no. 86 tahun 2017, dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan tersebut, dilakukan berbagai tahapan perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 yang sejalan dengan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Provinsi Gorontalo, yang juga selaras dengan RPD 2023-2026.

Perumusan Rencana Pembangunan Daerah dalam RPD 2023-2026 mengacu pada upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025 dimana terdapat misi yang menjadi penjabaran pencapaian visi RPJPD serta fokus-fokus pembangunan utama, yaitu; Misi Pertama, Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal, Misi Kedua, Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal, Misi ketiga, Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah.

Penyusunan RPD ini, dimana secara nasional telah sementara berjalan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2020- 2024, yang menetapkan Visi; "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan menjabarkannya pencapaiannya ke dalam Misi berikut: 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Renstra ini memuat visi, misi OPD, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo yang mengacu pada RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026.

Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo merupakan arahan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo guna mencapai sasaran-sasaran strategis di Provinsi Gorontalo. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), pemerintah daerah dan pemerintah Kabupaten/kota, para pelaku usaha serta masyarakat agar keseluruhan potensi dan sumberdaya yang tersedia dapat digunakan secara optimal.

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD mengacu pada Renstra 2023-2026

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

a. Tujuan

1. Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

b. Sasaran Jangka Menengah SKPD

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Kumperindag Tahun 2023 – 2026 meliputi :

1. Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah), Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase), dan meningkatnya nilai ekspor (USD)
2. Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan

STARATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi dan kebijakan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perluasan usaha Koperasi dan UKM sebagai berikut :

- **Bidang Koperasi dan UMKM**

Tabel 1.12. Strategi dan Kebijakan Bidang KUMKM

Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kapasitas usaha dan kelembagaan koperasi UKM	1. Peningkatan kapasitas SDM koperasi dan pendampingan koperasi 2. Peningkatan Kapasitas Usaha, akses pasar, akses pembiayaan dan penataan manajemen usaha 3. Pengawasan, Pemeriksaan, Pengendalian serta Penilaian Kualitas dan Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi 4. Fasiltasi pembiayaan dan penguatan modal UKM, Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM serta Kelembagaan UKM 5. Digitalisasi promosi, perluasan pemasaran dan pengembangan UKM (Integrasi UMKM Mart dan Toko Tani Indonesia 6. Peningkatan produktifitas UKM (produksi, pemasaran, kelembagaan, kerjasama dan kemitraan)

- **Bidang Perindustrian**

Strategi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan industri kecil menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.13. Strategi dan Kebijakan Bidang Perindustrian

Strategi	Kebijakan
Menyiapkan desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha industri, mengelola sistem informasi industri	1. Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri (RPIP/RPIK) Tahun 2021-2041 2. Fasilitasi Perolehan Izin dan pengawasan Usaha Industri 3. Penyediaan Data Informasi Industri Berbasis Digital

- **Bidang Perdagangan**

Strategi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta akses pasar luar negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 1.14. Strategi dan Kebijakan Bidang Perdagangan

Strategi	Kebijakan
Peningkatan kelancaran arus barang, stabilisasi harga dan pasar	1. Pengawasan dan Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok/Barang penting
	2. Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan/tertib niaga/ barang beredar dan jasa serta rekomendasi Ekspo
	3. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, pengawasan kegiatan perdagangan/tertib niaga/barang beredar dan jasa serta promosi penggunaan produk dalam negeri

Strategi	Kebijakan
Perluasan kemitraan dan kerjasama internasional, Pameran dan misi dagang untuk mendorong ekspor	4. Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor dan Optimalisasi Task Force Ekspor
Pengembangan usaha dan mutu pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan	5. Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

• Bidang Pelayanan SKPD

Strategi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik SKPD sebagai berikut :

Tabel 1.15. Strategi dan Kebijakan Bidang Pelayanan SKPD

Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Perencanaan,	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan penatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD
Pengelolaan Keuangan dan Reformasi Birokrasi	2. Transformasi digital dalam penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
	3. Meningkatkan Sarana, Prasarana, SDM dan Administrasi Perkantoran
	4. Meningkatkan Tata Kelola Data Sektoral dan Keuangan

b. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dirumuskan berdasarkan Kebijakan penyusunan rencana pembangunan daerah bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, dimana penyusunannya dilakukan secara teknokratik. RPD 2023 - 2026 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan yang terakhir dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007 - 2025. Periode akhir dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Gorontalo 2007 - 2025, yaitu Gorontalo Maju Dan Mandiri

Misi :

1. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Gorontalo yang Handal
3. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah

Berdasarkan Rencana Strategi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 telah ditetapkan visi dan misi yaitu :

Visi

"Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera".

Misi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo adalah :

1. Mendorong Pertumbuhan dan Perluasan Usaha Koperasi dan UKM
2. Meningkatkan Kualitas SDM Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan
3. Meningkatkan Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa serta Akses Pasar Dalam dan Luar Negeri
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik SKPD

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Adapun program pembangunan daerah berdasarkan Rancangan Pembangunan Daerah 2023-2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program perencanaan dan pembangunan industri
8. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
9. Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
10. Program pengembangan ekspor
11. Program standarisasi dan perlindungan konsumen
12. Program Perizinan dan pendaftaran Perusahaan
13. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan.

Pagu induk pada program ini sejumlah Rp. 15.280.412.305 kemudian terdapat revisi anggaran termasuk APBD-P sebesar (Rp. 645.656,-) sehingga total pagu setelah

perubahan Rp. 14.634.756.305,- realisasi Rp. 14.129.320.729,- dan silva Rp. 505.435.576,- antara lain pada sub kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar Rp. 1.018.978,- kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah Rp. 454.609.401,- yang merupakan sisa gaji pokok dan tunjangan.

2. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Outcome dari program ini adalah Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya (target 390 orang) capaian 400 orang.

Pagu induk program ini ditahun 2025 sebesar Rp. 241.559.000,- kemudian mengalami revisi pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sebesar (Rp. 120.275.000,-). Pada item belanja perjalanan dinas Rp. 103.650.000,- serta item belanja pendukung lainnya. Sehingga total pagu akhir setelah perubahan yaitu Rp. 121.284.000,-

Tahun 2025 tidak menerima DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian dengan target 390 orang di tahun 2025, Adapun realisasi sebanyak 400 orang.

3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Outcome adalah jumlah koperasi sehat sebanyak 20 koperasi dengan realisasi 18 koperasi

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel.

Jumlah anggaran induk pada program ini sebesar Rp. 257.664.000,- dengan jumlah revisi hasil pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sebesar (Rp. 123.326.500,-). Sehingga total pagu setelah perubahan Rp. 134.337.500,- dengan realisasi Rp. 132.420.375,- silva Rp. 1.917.125

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Outcome program ini adalah Jumlah Koperasi Aktif (target 25 Unit usaha, capaian 50 unit usaha).

Dimana jumlah koperasi aktif tahun 2025 diperoleh dari Jumlah koperasi yang yang diintervensi kegiatan di tahun 2025 sebanyak 50 koperasi dari total koperasi aktif tahun 2025 sebanyak 1721 koperasi.

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi,

Sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi Usaha dengan target 25 unit usaha capaian 25 unit usaha

Pagu awal sub kegiatan ini berjumlah Rp. 500.777.000,- kemudian mengalami revisi hasil pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sebesar (Rp. 447.652.000,-) pada item belanja perjalanan dinas biasa Rp. 47.652.000,- dan belanja hibah koperasi Rp. 400.000.000. sehingga total pagu akhir yang mendukung pencapaian target kinerja sebesar Rp. 53.125.000,-. Realisasi Rp. 53.064.636,- silva Rp. 60.364,- (capaian fisik 100% dan keuangan 99,89%)

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Outcome program adalah *Jumlah UKM yang berdaya saing* target 160 unit usaha dengan capaian kinerja 43 UKM). adapun capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,31% dari target 100%. Target kinerja program tidak tercapai karena keterbatasan anggaran dalam mengintervensi kegiatan antara lain peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada pelaku UKM khususnya untuk melakukan pembinaan (digitalisasi pemasaran) administrasi keuangan, dan bedah produk dalam upaya peningkatan daya saing UMKM

Pagu anggaran induk tahun 2025 sebesar Rp. 339.772.000,- kemudian mengalami revisi pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sebebsar (Rp. 293.626.000,-) sehingga pagu akhir setelah perubahan sejumlah Rp.

setelah perubahan pada program ini berjumlah Rp. 46.146.000,- realisasi 45.826.652,- silva Rp. 319.348

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

a. Sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Kalangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

Indikator kinerja adalah Jumlah unit usaha UMKM yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan target 300 unit usaha , realisasi 350 unit usaha.

Pagu anggaran setelah perubahan Rp. 46.146.000,- dari pagu induk sub kegiatan ini sejumlah Rp. 297.548.000,- dan mengalami revisi hasil pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sebesar (Rp. 251.402.000,-). Realisasi anggaran sub kegiatan Rp. 45.826.652,-

b. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan

Indikator kinerja adalah Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UMKM dan kewirausahaan target 358 unit usah capaian 0%

Target kinerja sub kegiatan ini tidak tercapai karena anggaran kegiatan ini telah mengalami revisi pencadangan OPD Tahun 2025 dan di Tahun 2025 tidak mendapatkan anggaran melalui DAK Non Fisik P2KUKM untuk mengintervensi sub kegiatan ini dalam mendukung indikator SDM yang mendapatkan advokasi.

Pagu anggaran hasil sub kegiatan ini sebesar Rp. 42.224.000,- tetapi mengalami revisi pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sebesar (Rp. 42.224.000,-) sehingga indikator Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan 358 orang tidak tercapai

6. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Outcome program adalah Jumlah UKM yang bertrasnformasi usaha dengan realisasi 52 unit usaha dari target 50 unit usaha. Target kinerja program tidak tercapai karena keterbatasan anggaran dalam mengintervensi kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada pelaku UMKM.

Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah, sub kegiatan Produksi & pengolahan, pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi

Pagu awal program ini berjumlah Rp. 742.991.000,- kemudian mengalami revisi dengan total Rp. 6.908.000.000,- yaitu :

- Revisi anggaran Ta. 2025 sebesar (Rp. 605.296.000,-)
- Pemanfaatan efisiensi sesuai Inpres I Tahun 2025 Rp. 6.908.000.000,- antara lain pada item belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat Rp. 6.563.000.000,- dan item belanja lainnya yang bersesuaian.

Sehingga total pagu setelah perubahan dalam mendukung pelaksanaan program ini sebesar Rp. 7.650.991.000,- dengan realisasi Rp. 7.646. 674.188,- dengan silva Rp. 4.316.812,-

Dalam pelaksanaan kegiatannya di tahun 2025 anggaran sebesar Rp. 4.993.030.000,- ditagging pada Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun Anggaran 2025 Provinsi Gorontalo (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Provinsi Gorontalo tahun 2025.

7. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Outcome dari program ini adalah Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri, dengan capaian 100% yaitu 36 Dokumen dari target 36 Dokumen.

Pagu awal program ini sejumlah Rp. 1.000.000.000,- kemudian terdapat revisi dengan total sebesar Rp. 3.589.602.000,- termasuk pada tahapan APBD-P 2025 sejumlah (Rp.10.950.000,-) pada beberapa item belanja yang bersesuaian. Sehingga total pagu akhir setelah perubahan Rp. 4.589.602.000,-. dengan realisasi Rp. 1.237.717.100,- (realisasi fisik 29,52% dan keuangan 26,97%)

Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri

a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (target 12 Dokumen, capaian 12 Dokumen).

Dalam melaksanakan kegiatannya di tahun 2025 didukung oleh anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.675.280.000,- dengan realisasi

Rp. 399.494.402,- dengan silva Rp. 1.275.785.598,- antara lain silva pada item belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp. 1.275.088.968,- dan item belanja lainnya sebesar Rp. 696.630,-

Adapun penganggaran induk APBD 2025 untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 351.396.000,-. Kemudian terdapat revisi dengan total sebesar Rp. 1.323.884.000,- termasuk tambahan anggaran melalui APBD-P sebesar Rp. 66.050.000,- antara lain pada item Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Bantuan Bahan dan Peralatan bagi IKM) Rp. 90.180.000,- serta item belanja lainnya yang bersesuaian.

b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (target 12 Dokumen dan capaian 12 Dokumen). Pagu awal sub kegiatan ditahun 2025 berjumlah Rp. 349.884.000,- kemudian terdapat revisi dengan total sejumlah Rp. 2.462.284.000,- yaitu revisi pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sejumlah (Rp. 124.458.000,-) pada item belanja pakaian adat daerah dan perjalanan dinas biasa. Selanjutnya adalah revisi pemanfaatan hasil efisiensi sesuai Inpres 1 Tahun 2025 & SE Mendagri 900/833/SJ Tahun 2025 sejumlah Rp. 2.513.742.000,- antara lain pada item belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, honorarium narasumber dan item belanja lainnya. Pada tahapan APBD-P sebesar (Rp. 77.000.000,-) antara lain pada item belanja barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat sebesar (Rp. 150.000.000,-) dan belanja lainnya yang bersesuaian, serta penyesuaian pagu SKPD Tahun 2025 sebesar Rp. 150.000.000,- yaitu belanja hibah uang kepada Dekranasda Provinsi Gorontalo. Sehingga total anggaran setelah perubahan pada sub kegiatan ini menjadi Rp. 2.812.168.000,- realisasi Rp. 736.225.798,- dengan silva Rp. 2.075.942.202,-. antara lain pada belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat Rp. 2.075.032.503,-

8. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Outcome Program Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri (12 Dokumen) Karena keterbatasan fiskal daerah maka target program ini tidak tercapai karena tidak teranggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ditahun 2025

9. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Outcome Program Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri (12 Dokumen). Karena keterbatasan fiskal daerah maka target program ini tidak tercapai karena tidak teranggarkan ditahun 2025

10. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Outcome dari program ini adalah Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi dengan target 1 dokumen dan capaian 1 dokumen *yaitu Dokumen fasilitasi untuk penerbitan Surat Keterangan Asal untuk 4 (empat) Perusahaan yaitu PT. Biomasa Jaya Abadi, PT. Milenium Agro Indo Selebes, PT. Pabrik Gula Gorontalo dan PT. Gorontalo Panel Lestari, PT. Gorontalo Panel Lestari serta perusahaan yang diawasi dalam hal pengawasan kualitas dan standar produk, pengawasan dokumen ekspor, pendampingan eksportir baru, dan memfasilitasi antara eksportir dengan instansi terkait yaitu perusahaan PT. Gorontalo Pangan Lestari, PT. Seger Pangan Sejahtera, PT. Multi Nabati sulawesi, PT. Dentosa Utama Lestari, PT. Indofish Gorontalo Ocean, PT. Tuna Teluk Tomini.*

Untuk pelaksanaan program ini didukung oleh anggaran hingga Desember 2025 sejumlah Rp. 23.550.000,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2025

berjumlah Rp. 23.405.540,- (99,39% keuangan dan 100% fisik), pada program ini tidak terdapat revisi maupun perubahan pada APBD-P 2025. Adapun silva pada program ini Rp. 144.460,- pada beberapa item belanja.

Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

Indikator sub kegiatan Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal dengan target 10 dokumen, capaian 74 dokumen yaitu dokumen Surat Keterangan Asal

11. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Outcome dari program ini adalah Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan target 28 Laporan, Capaian 28 Laporan yaitu 12 Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya serta 16 Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

Dalam pelaksanaan program ini didukung oleh anggaran hingga Desember 2025 sejumlah Rp. 4.130.936.500,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2025 berjumlah Rp. 4.076.805.113,- (98,69% keuangan dan 100% fisik). Adapun pagu awal program ini sejumlah Rp. 1.024.429.000,- kemudian mengalami revisi pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sejumlah (Rp. 82.385.500,-), tambahan anggaran hasil pencadangan anggarang sesuai Inpres 1 Tahun 2025 sejumlah Rp. 1.710.000.000,- (antara lain pada item belanja barang yang dijual dan diserahkan kepada masyarakat Rp. 1.541.550.000),- serta belanja lainnya yang bersesuaian) dan revisi penyesuaian pagu SKPD TA. 2025 Rp. 1.500.000.000,- (antara lain pada item belanja barang yang dijual dan diserahkan kepada masyarakat Rp. 1.377.450.000,- serta belanja lainnya yang bersesuaian).

Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Pada program dan kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu 12 laporan, capaian 12 laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kota.

Pagu awal sub kegiatan ini yaitu Rp. 44.258.000,- dan mengalami revisi hasil pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sebesar (Rp.17.000.000,-) pada item belanja perjalanan dinas biasa sehingga pagu akhir hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp. 27.258.000,- dengan realisasi Rp. 27.203.972,- dengan realisasi keuangan 99,80% dan fisik 100%. Anggaran untuk sub kegiatan ini meliputi belanja ATK, kertas dan bahan computer serta perjalanan dinas biasa.

- b. Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah laporan pelaksanaan Operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dengan capaian 4 laporan dari target 4 laporan.

Anggaran induk sub kegiatan ini berjumlah Rp. 915.765.000,- kemudian mengalami revisi sebesar Rp. 3.145.614.500,- yaitu :

- Revisi hasil pencadangan anggaran OPD 2025 (Rp. 64.385.500,-)
- Pemanfaatan efisiensi sesuai Inpres I Tahun 2025 & SE Mendagri 900/833/SJ Tahun 2025 senilai Rp. 1.710.000.000,- (pada beberapa item belanja antara lain belanja barang untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat Rp. 1.541.550.000,- dan belanja operasional pendukung pelaksanaan operasi pasar Rp. 168.450.00,-)
- dan revisi penyesuaian pagu OPD TA. 2025 Rp. 1.500.000.000,- (item belanja barang untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat Rp. 1.377.450.000,- dan belanja pendukung lainnya Rp. 122.550.000,-).

Total pagu sub kegiatan setelah perubahan sebesar Rp. 4.061.379.500,- dengan realisasi Rp. 4.007.342.341,- (98,67% keuangan, fisik 100%) Dalam pelaksanaan kegiatannya di tahun 2025 anggaran sebesar Rp. 1.710.000.000,- di tagging melalui sumber dana IF, dengan rincian :

- Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun Anggaran 2025 Provinsi Gorontalo (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Provinsi Gorontalo tahun 2025 sebesar Rp. 1.710.000.000,- yaitu Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat berupa barang kebutuhan pokok dan pendukung lainnya pada kegiatan Operasi Pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

12. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Outcome dari program ini adalah Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor dengan target 8 Komoditi, dan capaian 8 komoditi yaitu molases, wood pelet, santan beku, minyak mentah, kelapa parut, jagung, ikan, kepiting.

Untuk capaian komoditi unggulan yang diekspor diperoleh berdasarkan dokumen Surat Keterangan Asal dan Bea Cukai Provinsi Gorontalo, Adapun untuk pelaksanaan kegiatan pendukung tidak dapat dilaksanakan karena belum mendapat porsi anggaran (keterbatasan fiskal daerah).

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk ekspor Unggulan

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan dengan capaian 20 pelaku usaha dari target 8 pelaku usaha.

Anggaran induk sub kegiatan ini berjumlah Rp. 228.052.000,- kemudian mengalami revisi pencadangan anggaran OPD tahun 2025 sebesar (Rp. 136.538.000),-. Sehingga total pagu akhir Rp. 91.514.000,-

13. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Outcome dari program adalah Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen target 9 Dokumen, Capaian 9 Dokumen yaitu dokumen pengawasan produk potensial yang dipantau, pengujian mutu barang yang diterbitkan, dokumen pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota serta dokumen hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi

Alokasi Anggaran awal program ini Sebesar Rp. 2.432.088.000,- tambahan APBD-P sebesar Rp. 79.390.000,- dan revisi hasil pencadangan anggaran OPD tahun 2025 sebesar Rp. 1.224.263.500,- pada beberapa item belanja yang bersesuaian,

sehingga total anggaran setelah perubahan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.296.964.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.259.117.472,- (96,26 persen keuangan dan 100 persen realisasi fisik).

Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen, capaian 187 kasus dari target 12 kasus

Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan sub kegiatan ini didukung oleh anggaran awal sebesar Rp. 1.920.518.000,- kemudian terdapat tambahan anggaran melalui finalisasi APBD-P sebesar Rp. 37.560.000,- yang diperuntukkan untuk penunjang kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) antara lain perjalanan dinas biasa Rp. 37.404.000,- dan bahan cetak Rp. 156.000,-. Serta revisi hasil pencadangan anggaran OPD tahun 2025 sebesar Rp. (Rp. 969.694.000,-). Sehingga total pagu anggaran hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp. 998.134.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 960.789.900,- dan silva sebesar Rp. 37.344.100,- yang merupakan sisa pembayaran honorarium majelis sidang dan sekretariat yang tidak tertagih lagi Rp. 37.340.000,- karena target kinerja anggota BPSK yang tidak tercapai dan terdapat 9 (sembilan) orang anggota BPSK yang tidak ditagih lagi honorinya (3 orang BPSK Kabupaten Boalemo, 3 orang BPSK Kabupaten Gorontalo Utara dan 3 Orang Kabupaten Bone Bolango karena alasan pensiun 1 orang, pindah domisi 1 orang, mengundurkan diri karena terangkat menjadi PNS 3 orang, 4 orang mengundurkan diri serta pada item belanja lainnya. Adapun realisasi Fisik mencapai 100% dan keuangan 96,26%.

❖ Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja kegiatan ini jumlah pengujian dan sertifikasi mutu produk dengan target 204 dokumen, capaian 112 Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang.

Jumlah pagu induk kegiatan ini total sejumlah Rp. 421.094.000, kemudian terdapat revisi pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 (Rp. 219.898.500) pada beberapa

item belanja yang bersesuaian sera pada tahapan APBD-P sejumlah Rp. 41.830.000,- Sehingga anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini hingga 31 Desember 2025 sejumlah Rp. 243.025.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 2242.525.672,- atau 99.79 % untuk capaian realisasi keuangan dan 100% capaian realisasi fisik.

Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian

Jumlah pagu induk sejumlah Rp. 259.258.000, kemudian terdapat revisi pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 (Rp. 79.323.500) pada item belanja perjalanan dinas biasa dan belanja bahan kimia. Sehingga anggaran yang mendukung pelaksanaan sub kegiatan ini hingga 31 Desember 2025 sejumlah Rp. 179.934.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 179.590.872,- atau 99.81 % untuk capaian realisasi keuangan dan 100% capaian realisasi fisik.

Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Hasil Pengujian/Sertifikat Kesesuaian Mutu barang yang diterbitkan, target 200 laporan capaian 112 laporan. Laporan Hasil Pengujian antara lain pada komoditi beras, biji kakao, rumput laut, gabah, gelatin tulang ikan, cangkang sotong, jagung, lada putih, produk UMKM, karbon aktif tempurung kelapa. Ketidakcapaian atas target sub kegiatan ini disebabkan karena laboratorium belum memiliki peralatan untuk pengujian parameter tertentu (cemaran logam dalam minyak goreng, rumput laut, biji kakao) sesuai keinginan pelanggan dan kurang maksimalnya anggaran untuk pengambilan sampel.

Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi

Indikator Kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah Sertifikat produk/person/sertifikat inspeksi yang diterbitkan dengan target 4 sertifikat dan capaian tidak ada karena di Tahun 2025 tidak ada ekspor untuk 4 (empat) komoditi akreditasi yaitu jagung, beras, biji kakao dan rumput laut sehingga belum ada Sertifikat Kesesuaian Mutu (SKM) yang diterbitkan, disamping itu belum ada perluasan ruang lingkup BPSMB sebagai Lembaga Sertifikasi Produk.

Jumlah pagu awal untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sejumlah Rp. 66.537.000,- kemudian pada tahapan finalisasi APBD-P mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 41.830.000,- (belanja perjalanan dinas biasa, belanja bimbingan teknis, belanja makan minum aktivitas lapangan) dimana sebelumnya mengalami revisi hasil pencadangan anggaran OPD Tahun 2025 sebesar (Rp. 63.360.000,-) pada beberapa item belanja yang bersesuaian. Sehingga pagu setelah perubahan

Rp. 45.007.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.874.400,- atau 99,71 % untuk capaian realisasi keuangan dan 100% capaian realisasi fisik, silva Rp. 132.600,-

Sub Kegiatan Pemantauan Mutu Produk

Indikator kinerja adalah Jumlah Produk Potensial yang Dipantau dengan target 3 komoditi, capaian 2 komoditi yaitu komoditi kopi dan biji kakao. Target ini tidak tercapai karena minimnya anggaran untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan komoditi potensial.

Anggaran induk sub kegiatan ini sejumlah Rp. 95.259.000,- kemudian terdapat revisi pencadangan OPD Tahun 2025 sebesar (Rp. 77.215.000,-). Total pagu akhir setelah perubahan Rp. 18.084.000,- dengan realisasi Rp. 18.060.400,- dan silva Rp. 23.600,- (capaian keuangan 99,87% dan fisik 100%).

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 164/MPP/KEP/6/1996 Tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu, dimana terdapat 4 (empat) Komoditi yaitu kopi, biji kakao, kelapa sawit dan lada putih.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dokumen perencanaan dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025, serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah tersebut disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan tahunan, serta tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh program dan kegiatan dirumuskan untuk mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2025.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian, serta perdagangan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo melaksanakan program dan kegiatan yang diarahkan

pada penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM dan IKM, pengembangan industri berbasis potensi unggulan daerah, serta penguatan sistem perdagangan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Seluruh kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025 telah direncanakan, dianggarkan, dan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta dilengkapi dengan indikator kinerja program dan kegiatan yang terukur. Indikator tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat capaian kinerja perangkat daerah, baik dari sisi output maupun outcome, guna memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah juga dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta mendorong sinergi dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan dan memaksimalkan manfaat kegiatan bagi masyarakat.

Secara umum, pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Perencanaan Tahunan yang ditetapkan. Kegiatan tersebut mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan menjadi bagian integral dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025.

Tabel 1.16. Rumusan Rencana Program SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	
							Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa							
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100	%	14.634.756.305		100	%	14.634.756.305
2	17	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah			10	Dok	760.785.400				760.785.400
2	17	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4	Dok	391.400.400		4	Dok	391.400.400
2	17	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6	Lap	369.385.000		6	Lap	369.385.000
2	17	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan			87	Orang/ Bulan	10.052.421.705				10.052.421.705
2	17	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			87	Orang/ Bulan	9.976.439.505		87	Orang/ Bulan	9.976.439.505

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	
							Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa							
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100	%	14.634.756.305		100	%	14.634.756.305
2	17	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	Lap	75.982.200		1	Lap	75.982.200
2	17	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			87	Orang	128.214.000		87	Orang	128.214.000
2	17	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			120	Orang	128.214.000		87	Orang	128.214.000
2	17	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan			30	paket	633.036.800		30	paket	633.036.800

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	
							Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa							
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100	%	14.634.756.305		100	%	14.634.756.305
2	17	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			30	Paket	633.036.800		30	Paket	633.036.800
2	17	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1	Lap	3.060.298.400		1	Lap	3.060.298.400
2	17	1	01.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	Lap	2.523.222.400		1	Lap	2.523.222.400
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPSMB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	Lap	537.076.000				537.076.000

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	
							Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa							
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100	%	14.634.756.305		100	%	14.634.756.305
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat			20	Koperasi	134.337.500		20	Kop	134.337.500
2	17	3	01.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi			20	Dok	134.337.500		20	Dok	134.337.500
2	17	3	01.01	2	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel			20	Unit Usaha	134.337.500		20	Unit Usaha	134.337.500
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya			390	Orang	121.284.000		390	Orang	121.284.000

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	
							Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa							
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100	%	14.634.756.305		100	%	14.634.756.305
2	17	5	01.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			390	Orang	121.284.000		390	Orang	121.284.000
2	17	5	01.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			390	Orang	121.284.000		390	Orang	121.284.000
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif			25	Unit Usaha	53.125.000		20	Unit Usaha	53.125.000
2	17	6	01.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,			25	Unit Usaha	53.125.000		20	Unit Usaha	53.125.000

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	
							Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa							
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100	%	14.634.756.305		100	%	14.634.756.305
						Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha									
2	17	6	01.01	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			25	Unit Usaha	53.125.000		20	Unit Usaha	53.125.000
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing			160	Unit Usaha	46.146.000		70	Unit Usaha	46.146.000

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	
							Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa							
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100	%	14.634.756.305		100	%	14.634.756.305
2	17	7	01.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya			300	Unit Usaha	46.146.000		250	Unit Usaha	46.146.000
2	17	7	01.01	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			300	Unit Usaha	46.146.000		250	Unit Usaha	46.146.000

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	
							Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa							
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100	%	14.634.756.305		100	%	14.634.756.305
2	17	7	01.01	2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan			358	Orang	-		318	Orang	-
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha			50	Unit Usaha	7.650.991.000		30	Unit Usaha	7.650.991.000
2	17	8	01.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah			50	Unit Usaha	7.650.991.000		40	Unit Usaha	7.650.991.000
2	17	8	01.01	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi			50	Unit Usaha	7.650.991.000		40	Unit Usaha	7.650.991.000

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	
							Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa							
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100	%	14.634.756.305		100	%	14.634.756.305
					Jumlah Urusan Koperasi & UKM						22.640.639.805				22.640.639.805
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi			1	Dok	23.550.000		1	Dok	23.550.000
3	30	2	01.02		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi			1	Dok	(tidak teranggarkan)		1	Dok	(tidak teranggarkan)

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	
							Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa							
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100	%	14.634.756.305		100	%	14.634.756.305
3	30	2	01.02	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission			1	Dok	(tidak teranggarkan)		1	Dok	(tidak teranggarkan)
3	30	2	01.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA			10	Dok	23.550.000		9	Dok	23.550.000

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	
							Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa							
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100	%	14.634.756.305		100	%	14.634.756.305
						dan Angka Pengenal Importir (API)									
3	30	2	01.04	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal			10	Dok	23.550.000		9	Dok	23.550.000
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			28	Lap	4.130.936.500		12	Lap	4.130.936.500

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	
							Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa							
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100	%	14.634.756.305		100	%	14.634.756.305
3	30	4	01.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			16	Lap	4.088.637.500		12	Lap	4.088.637.500
3	30	4	01.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			12	Lap	27.258.000		12	Lap	27.258.000

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	
							Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa							
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100	%	14.634.756.305		100	%	14.634.756.305
3	30	4	01.02	2	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			4	Lap	4.061.379.500		4	Lap	4.061.379.500
3	30	4	01.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya			12	Lap	42.299.000		12	Lap	42.299.000

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Cat	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif
							Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa								
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100	%	14.634.756.305			100	%	14.634.756.305
3	30	4	01.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			12	Lap	42.299.000			12	Lap	42.299.000
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor			8	Komoditi	91.514.000			7	Komoditi	91.514.000
3	30	5	01.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			8	Pelaku Usaha	91.514.000			7	Pelaku Usaha	91.514.000

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	
							Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa							
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100	%	14.634.756.305		100	%	14.634.756.305
3	30	5	01.01	3	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan			8	Pelaku Usaha	91.514.000		7	Pelaku Usaha	91.514.000
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen			9	Dok	1.296.964.500		7	Dok	1.296.964.500
3	30	6	01.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen			12	Kasus	998.134.000		11	Kasus	998.134.000
3	30	6	01.01	1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif			6	BPSK	998.134.000		6	BPSK	998.134.000
3	30	6	01.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk			204	Dok	243.025.500		153	Dok	243.025.500

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif		
							Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa								
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100	%	14.634.756.305			100	%	14.634.756.305
3	30	6	01.02	1	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau			3	Komoditi	18.084.000			3	Komoditi	18.084.000
3	30	6	01.02	2	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang			200	Dok	179.934.500			150	Dok	179.934.500
3	30	6	01.02	3	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan			4	Sertifikat	45.007.000			3	Sertifikat	45.007.000
3	30	6	01.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi			50	Pelaku Usaha	55.805.000			40	Pelaku Usaha	55.805.000
3	30	6	01.03	1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi			12	Laporan	55.805.000			12	Lap	55.805.000

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	
							Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa							
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100	%	14.634.756.305		100	%	14.634.756.305
					Jumlah Urusan Perdagangan						5.542.965.000				5.542.965.000
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri			1	Dok	4.589.602.000		1	Dok	4.589.602.000
3	31	2	01.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			1	Dok	4.589.602.000		1	Dok	4.589.602.000
3	31	2	01.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			12	Dok	1.675.280.000		12	Dok	1.675.280.000

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	
							Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa							
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100	%	14.634.756.305		100	%	14.634.756.305
3	31	2	01.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			12	Dok	2.812.168.000		12	Dok	2.812.168.000
3	31	2	01.01	6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			12	Dok	102.154.000		12	Dok	102.154.000
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi			1	Dok	Tidak teranggarkan		1	Dok	Tidak teranggarkan

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	
							Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa							
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100	%	14.634.756.305		100	%	14.634.756.305
3	31	3	01.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi			1	Dok	Tidak terangkan			Dok	Tidak terangkan
3	31	3	01.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan			1	Dok	Tidak terangkan		1	Dok	Tidak terangkan

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif
							Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa							
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100	%	14.634.756.305		100	%	14.634.756.305
						Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi :									
						1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota,									

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Cat	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi			Target Capaian Kinerja		Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif	
					Kab/ Kota											Kec/Kel/ Desa
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100	%	14.634.756.305			100	%	14.634.756.305
						3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi										
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pengelolaan sistem Informasi Industri Yang tersedia			1	Dok	tidak terangkan			1	Dok	tidak terangkan
3	31	4	01.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			13	Dok	tidak terangkan			13	Dok	tidak terangkan

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	
							Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa							
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100	%	14.634.756.305		100	%	14.634.756.305
3	31	4	01.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			1	Dok	tidak terangkan		1	Dok	tidak terangkan
					Jumlah Urusan Perindustrian					4.589.602.000					4.589.602.000
					Total (Jumlah Urusan Koperasi & UKM + Perdagangan + Perindustrian)					32.773.206.805					32.773.206.805

*Pagu usulan SKPD (rencana tahun 2025) merupakan pagu akhir setelah perubahan

3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo hanya termasuk dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar (tidak termasuk dalam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar)



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi

IKK No. 2.k.1

Persentase Pertumbuhan volume usaha koperasi

Penjelasan IKK

1. Konsep/Tujuan	:	Mengukur pertumbuhan volume usaha koperasi
2. Rumus	:	$\frac{(\sum \text{Volume usaha koperasi tahun berjalan} - \sum \text{Volume usaha koperasi tahun sebelumnya})}{\sum \text{Volume usaha koperasi tahun sebelumnya}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Rp. 23,281,433,000} - \text{Rp. 12,790,071,000}}{\text{Rp. 12,790,071,000}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	82,03 %
4. Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Volume usaha koperasi tahun berjalan, yaitu jumlah total nilai usaha seluruh koperasi aktif berdasarkan laporan keuangan tahun berjalan. Volume usaha koperasi tahun sebelumnya, yaitu jumlah total nilai usaha seluruh koperasi aktif pada tahun sebelumnya. Volume usaha merupakan nilai aktivitas usaha koperasi yang tercatat dalam laporan keuangan (laporan laba rugi). Data harus berasal dari koperasi aktif dan laporan keuangannya telah diverifikasi dinas. ▪ Penyebut Volume usaha koperasi tahun sebelumnya Adalah seluruh koperasi aktif pada tahun sebelumnya, berdasarkan laporan keuangan yang valid dan telah diverifikasi. Hanya koperasi aktif yang menyampaikan laporan lengkap yang dimasukkan dalam perhitungan.
5. Data Pendukung	:	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas Koperasi; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rekapitulasi seluruh data koperasi tahun berjalan berikut dengan daftar koperasi aktif, rekap volume usaha, berita acara verifikasi data. ▪ Penyebut

		Dibuktikan dengan dokumen pendukung antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas Koperasi; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rekapitulasi jumlah koperasi yang aktif pada tahun sebelumnya rekap volume usaha, berita acara verifikasi data.
6. Sumber Data		Sumber Data Pembilang dan Penyebut: 1. Laporan Laba Rugi Koperasi Tahun Berjalan dan Tahun Sebelumnya; 2. Database dari Dinas Koperasi; dan Laporan RAT;
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. ▪ Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. ▪ Peraturan Menteri Koperasi dan Ukm Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata cara Pembentukan Produk Hukum. ▪ Peraturan Menteri Koperasi dan Ukm Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi.

IKK No. 2.k.2

Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Menjamin usaha kecil mendapat perlindungan dan kepastian hukum, terintegrasi pada data nasional, dan peningkatan kualitas kebijakan dalam kemudahan berusaha.
2. Rumus	:	$\frac{\sum \text{Usaha Kecil yang Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)}}{\sum \text{Usaha Kecil Keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{686}{7214} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	9.50 %
4. Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Keseluruhan jumlah pelaku usaha kecil yang memperoleh izin usaha (NIB) sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha. Yang dimaksud dengan “memperoleh NIB” adalah bahwa pelaku usaha telah melakukan pendaftaran perizinan berusaha, memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan, dan telah diterbitkan NIB secara resmi sebagai bukti bahwa pelaku usaha kecil telah memiliki legalitas usaha yang sah. ▪ Penyebut Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil (modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan atau berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
5.Data Pendukung	:	▪ Pembilang dan Penyebut : Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala perangkat daerah; 2. Kop surat dan stempel resmi;

		- Tempat dan tanggal, bulan, tahun; - Jumlah usaha kecil yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan kriteria; - Jumlah keseluruhan usaha kecil dan menengah yang tersebar pada kabupaten/kota di wilayah provinsi.
6. Sumber Data	:	Sumber Data Pembilang dan Penyebut : - Seluruh perangkat daerah dan melalui koordinasi oleh Perangkat daerah yang menangani urusan usaha mikro, kecil dan menengah; - Rincian data nama kabupaten/kota, nama pemilik usaha, jenis barang/komoditi usaha, alamat tempat usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), modal usaha, kategori usaha (kecil/ menengah); - Apabila rincian 1 dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: - Halaman 1 (Judul); - Halaman pertengahan; - Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan kepala perangkat daerah; - Dapat menyertakan <i>link google drive</i> dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

IKK No. 2.k.3

Persentase Proporsi Ekspor dari Usaha Kecil

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Menilai daya saing usaha kecil di pasar internasional serta mengukur efektivitas kebijakan daerah dalam mendorong usaha kecil berkembang dan meningkatkan kapasitas usahanya.
2. Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang telah melakukan ekspor}}{\text{Jumlah usaha kecil}} \times 100\%$ $\frac{0}{7214} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	0 (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Keseluruhan jumlah pelaku usaha kecil yang telah melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean (ekspor) yang dilengkapi dengan perizinan berusaha yaitu wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor (Eksportir Terdaftar dan/atau Persetujuan Ekspor) yang telah diterbitkan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang kepada kantor pabean. ▪ Penyebut Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil (modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan atau berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
5. Data Pendukung	:	▪ Pembilang dan Penyebut : Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala perangkat daerah; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; 4. Rekapitulasi jumlah usaha kecil yang melakukan ekspor; dan

		5. Rekapitulasi seluruh jumlah usaha kecil.
6. Sumber Data	:	Sumber Data Pembilang dan Penyebut : 1. Seluruh perangkat daerah dan melalui koordinasi oleh Perangkat daerah yang menangani urusan usaha mikro, kecil dan menengah; 2. Rincian data seluruh jumlah usaha kecil yang melakukan ekspor yang memuat nama kabupaten/kota, nama pemilik usaha, jenis barang/komoditi usaha, alamat tempat usaha, NIB, perizinan berusaha di bidang ekspor, dan modal usaha; 3. Apabila rincian 1 dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan kepala perangkat daerah; dan d. Dapat menyertakan <i>link google drive</i> dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; ▪ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;

17. Urusan Perindustrian Provinsi

Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah

IKK No. 3.g.1

Penjelasn IKK

1. Konsep/Tujuan	:	Mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan Industri nasional
2. Rumus	:	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%. dokumen perencanaan pembangunan industri daerah yang terdiri dari: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20 %, dengan rumus: $\text{Capaian} \times \text{Bobot} = \text{hasil capaian sasaran}$ Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 20\%) = 20\%$; • Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 20\%) = 18\%$; • jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 20\%) = 16\%$; • Dan seterusnya. 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi dengan bobot maksimal 20 %, dengan rumus: $\text{Capaian} \times \text{Bobot} = \text{hasil capaian sasaran}$ Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 20\%) = 20\%$; • Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 20\%) = 18\%$; • jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 20\%) = 16\%$; • Dan seterusnya. 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan orang) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan

		Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 15 %, dengan rumus: $\text{Capaian} \times \text{Bobot} = \text{hasil capaian sasaran}$ Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 20\%) = 20\%$; • Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 20\%) = 18\%$; • jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 20\%) = 16\%$; • Dan seterusnya. 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan US\$) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20%, dengan rumus: $\text{Capaian} \times \text{Bobot} = \text{hasil capaian sasaran}$. Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 20\%) = 20\%$; • Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 20\%) = 18\%$; • jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 20\%) = 16\%$; • Dan seterusnya. 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.) Provinsi diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20 %, dengan rumus: $\text{Capaian} \times \text{Bobot} = \text{hasil capaian sasaran}$ Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 20\%) = 20\%$; • Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 20\%) = 18\%$; • jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 20\%) = 16\%$; • Dan seterusnya.
3. Satuan Hasil	:	60.61 %
4. Definisi Operasional	:	▪ Pembilang - Realisasi dari 5 sasaran pembangunan industri daerah setiap tahun yang merupakan sasaran yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri provinsi (RPIP) dalam jangka panjang dan wajib ditentukan sasaran tahunannya dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan.

		▪ Penyebut - Target dari 5 sasaran pembangunan industri daerah setiap tahun yang merupakan sasaran yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri provinsi (RPIP) dalam jangka panjang dan wajib ditentukan sasaran tahunannya dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan.
5. Data Pendukung	:	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat rincian perhitungan antara lain : 1) Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan persentase), 2) Realisasi Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi (satuan persentase), 3) Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan orang), 4) Realisasi Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan US\$), 5) Realisasi Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.). ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat rincian perhitungan antara lain : 1) Target Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan persentase), 2) Target Realisasi Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi (satuan persentase), 3) Target Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan orang), 4) Target Realisasi Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan US\$), 5) Target Realisasi Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.).
6. Sumber Data	:	Sumber Data Pembilang : 1. Dinas perindustrian; 2. Rincian perhitungan antara lain :

		a. Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan persentase) dari BPS; b. Realisasi Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi (satuan persentase) dari BPS; c. Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan orang) dari e-SKA; d. Realisasi Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan US\$) dari SIINas; dan e. Realisasi Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.), dari DPMPTSP. f. Dapat menggunakan <i>link Google Drive</i> untuk menyajikan sumber data yang lengkap. Sumber Data Penyebut : 1. Dinas perindustrian; 2. Rincian perhitungan antara lain : a. Target Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan persentase) dari BPS; b. Target Realisasi Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi (satuan persentase) dari BPS c. Target Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan orang) dari e-SKA; d. Target Realisasi Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan US\$) dari SIINas; dan e. Target Realisasi Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.) dari DPMPTSP. f. Dapat menggunakan <i>link Google Drive</i> untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 sampai dengan 2035.

IKK No. 3.g.2

Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Besar yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional

Penjelasan IKK Outcome

1. Konsep/Tujuan	:	Memenuhi kewajiban hukum/kepatuhan pelaku usaha industri besar yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional
2. Rumus		$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha industri besar yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional}}{\text{Jumlah seluruh pelaku usaha industri besar}} \times 100\%$ $\frac{10}{29} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	34,48%
4. Definisi Operasional	:	▪ Pembilang dan Penyebut Jumlah pelaku usaha industri besar meliputi : a) Pelaku usaha industri yang memenuhi kriteria dengan mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan/atau memiliki nilai investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan industri di wilayah provinsi. b) Pelaku usaha industri seluruh subsektor industri pengolahan : - Industri makanan dan minuman; - Industri kimia, farmasi; - Industri logam, mesin, otomotif; - Industri tekstil dan produk tekstil; - Industri elektronik; - Industri pulpen dan kertas; - Dan seluruh subsektor industri manufaktur lainnya. c) Pelaku usaha industri yang telah memperoleh perizinan berusaha di sektor industri wajib mengisi dan memperbarui data di SIINas.
5. Data Pendukung	:	▪ Pembilang dan Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat rekapitulasi pelaku usaha industri besar yang telah

		melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
6. Sumber Data	:	▪ Pembilang dan Penyebut 1. Dinas perindustrian; 2. Rincian pelaku usaha industri besar yang telah melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional meliputi: a. Nama pelaku usaha; b. Alamat; c. Jenis Industri; d. Nomor Induk Berusaha (NIB); e. KBLI. f. Dapat menggunakan <i>link Google Drive</i> untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian; ▪ Peraturan Menteri Perindustrian No. 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.

IKK No. 3.g.3

Persentase Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi

Penjelasan IKK

1. Konsep/Tujuan	:	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri besar di Provinsi
2. Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah industri besar Tahun } N - \text{Jumlah Industri Tahun } N-1}{\text{Jumlah industri besar Tahun } N-1} \times 100\%$ $\frac{29 - 29}{29} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	0 %
4. Definisi Operasional	:	▪ Pembilang - Seluruh jumlah industri yang memenuhi kriteria dengan mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan/atau memiliki nilai investasi lebih ,dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada tahun pelaporan dikurangi tahun pelaporan sebelumnya di wilayah provinsi. ▪ Penyebut - Seluruh jumlah industri yang memenuhi kriteria dengan mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan/atau memiliki nilai investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada tahun sebelumnya di wilayah provinsi.
5. Data Pendukung	:	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat rekapitulasi daftar industri besar sesuai kriterianya pada tahun pelaporan. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat rekapitulasi daftar industri besar sesuai kriterianya pada tahun sebelumnya.
6. Sumber Data	:	Sumber Data Pembilang : 1. Dinas perindustrian; 2. Rincian daftar industri besar tahun n dan tahun n-1;

		3. Dapat menggunakan Google Drive untuk menyajikan sumber data yang lengkap. Sumber Data Penyebut : 1. Dinas perindustrian; 2. Rincian daftar industri besar tahun n-1; 3. Dapat menggunakan <i>link Google Drive</i> untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Perindustrian No. 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.



IKK No. 3.g.4

Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor

Penjelasan IKK

1. Konsep/ Tujuan	:	Meningkatkan kontribusi industri terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor
2. Rumus	:	$\frac{\text{Nilai investasi sektor industri}}{\text{Total investasi seluruh sektor}} \times 100\%$ $\frac{3,906,591,076,679}{5,156,862,419,081} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	75,76 %
4. Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Jumlah realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri baik investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing terkait nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan Industri pada tahun pelaporan (dalam satuan rupiah). ▪ Penyebut Jumlah realisasi investasi seluruh sektor baik investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing pada tahun pelaporan (dalam satuan rupiah).
5. Data Pendukung	:	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat rekapitulasi jumlah realisasi sektor industri dan kawasan industri di Provinsi. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang rekapitulasi Jumlah realisasi seluruh sektor di Provinsi.

6. Sumber Data	:	Sumber Data Pembilang : 1. Dinas perindustrian; 2. Rincian realisasi sektor industri dan kawasan industri di Provinsi; 3. Dapat menggunakan Google Drive untuk menyajikan sumber data yang lengkap. Sumber Data Penyebut : 1. Dinas perindustrian; 2. Rincian Rincian daftar investasi seluruh sektor di Provinsi; 3. Dapat menggunakan <i>link Google Drive</i> untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Regulasi	:	▪ Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri. ▪ Peraturan Kepala BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.



17. Urusan Perdagangan Provinsi

IKK No. 3.f.1

Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen per Provinsi

Penjelasan IKK

1. Konsep/Tujuan	:	memantau penanganan pengaduan secara berkala dan memastikan bahwa setiap keluhan masyarakat ditindaklanjuti secara profesional, cepat, dan berkualitas
2. Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani pada tahun N}}{\text{Jumlah pengaduan konsumen yang masuk pada tahun N}} \times 100\%$ $\frac{180}{187} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	96.26 %
4. Definisi Operasional	:	▪ Pembilang - Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani pada tahun N adalah jumlah pengaduan konsumen pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat yang ditangani oleh dinas Provinsi dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan. ▪ Penyebut - Jumlah pengaduan konsumen yang masuk pada tahun N adalah jumlah seluruh pengaduan konsumen pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat yang masuk di dinas provinsi dan BPSK, baik yang sudah ditangani dan diselesaikan maupun yang belum ditangani dan belum diselesaikan pada tahun berjalan.
5. Data Pendukung	:	▪ Pembilang dan Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa Surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala dinas perdagangan, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan, tahun penandatanganan, dan memuat Rekapitulasi Jumlah Pengaduan Konsumen Yang Ditangani Pada Tahun N dan Jumlah Pengaduan Konsumen Yang Masuk Pada Tahun N

6. Sumber Data	: 1. Dinas Perdagangan Provinsi; 2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); 3. Melampirkan dokumen sumber data, antara lain: - Dokumen Berita acara hasil klarifikasi/fasilitasi penyelesaian pengaduan yang diterima oleh dinas provinsi dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada tahun berjalan; - Formulir Pengaduan Konsumen dari BPSK (Sampling); - Rincian Jumlah Pengaduan Konsumen Yang Ditangani Pada Tahun N dan Jumlah Pengaduan Konsumen Yang Masuk Pada Tahun N. 2. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul) b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan <i>link Google Drive</i> dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	: ▪ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ▪ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; ▪ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 Tahun 2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen; ▪ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

IKK No. 3.f.2

Nilai Ekspor Barang per Provinsi

Penjelasan IKK

1. Konsep/Tujuan	:	untuk menggambarkan tingkat kinerja ekonomi daerah dalam kegiatan perdagangan internasional, khususnya kontribusi sektor produksi dan manufaktur terhadap ekspor nasional
2. Rumus	:	$\frac{\text{Nilai ekspor barang ke negara lain dalam 1 tahun}}{\text{Target nilai ekspor barang ke negara lain dalam 1 tahun.}} \times 100\%$ $\frac{52,504,306.66 \text{ USD}}{15,548,086 \text{ USD}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	337.69 %
4. Definisi Operasional	:	▪ Pembilang - Nilai ekspor barang ke negara lain dalam 1 tahun adalah Total nilai barang yang diekspor dari provinsi/wilayah Indonesia ke negara tujuan selama periode satu tahun kalender, dihitung berdasarkan nilai Free on Board (FOB) sesuai Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); - Nilai FOB adalah total seluruh biaya sampai barang di atas kapal pada pelabuhan muat di negara pengekspor; - Dokumen PEB adalah dokumen inti dalam proses ekspor yang wajib disampaikan eksportir untuk mendapatkan izin muat dari Bea Cukai. Tanpa PEB, barang tidak dapat dilaporkan atau diproses sebagai ekspor resmi; - PEB diajukan secara elektronik melalui Sistem Indonesia National Single Window (INSW) atau aplikasi CEISA Ekspor Bea Cukai; - Besaran nilai dalam satuan USD (\$). ▪ Penyebut - Target nilai ekspor barang ke negara lain dalam 1 tahun adalah besaran nilai ekspor yang direncanakan oleh Provinsi selama satu tahun kalender; - Besaran nilai dalam satuan USD (\$).

5. Data Pendukung	:	▪ Pembilang dan Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa Surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala dinas Perdagangan, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan, tahun penandatanganan, dan memuat rekapitulasi Nilai ekspor barang ke negara lain dalam 1 tahun dan Target nilai ekspor barang ke negara lain dalam 1 tahun.
6. Sumber Data	:	Sumber Data: 1. Dinas Perdagangan Provinsi; 2. Bea Cukai Provinsi; 3. Melampirkan dokumen sumber data, antara lain: - Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) melalui Sistem Indonesia National Single Window (INSW) atau aplikasi CEISA Ekspor Bea Cukai; - Data Ekspor per Komoditas per Provinsi; - Rincian Nilai ekspor barang ke negara lain dalam 1 tahun dan Target nilai ekspor barang ke negara lain dalam 1 tahun. 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul) b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada <i>link google.drive</i>.
7. Dasar Hukum	:	▪ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ▪ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; ▪ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; ▪ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2022 Tahun 2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor; ▪ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat :

a. Target Kinerja Dalam Pencapaian Kinerja

Adapun Target Kinerja dalam perjanjian kinerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2025	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	10	Dokumen
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan	87	Orang/Bulan
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87	Orang/Bulan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	87	Orang
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120	Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	30	paket
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	Paket

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2025	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Laporan
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	20	Koperasi
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	20	Dokumen
- Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20	Unit Usaha
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390	Orang
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	390	Orang
- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	390	Orang
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif	25	Unit Usaha
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	25	Unit Usaha
- Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	25	Unit Usaha
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing	160	Unit Usaha

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2025
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	300 Unit Usaha
- Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	300 Unit Usaha
- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	358 Orang
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	50 Unit Usaha
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah	50 Unit Usaha
- Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50 Unit Usaha
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi	1 Dokumen
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	10 Dokumen
- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	10 Dokumen
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	28 Laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2025	
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	16	Laporan
<i>- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</i>	12	Laporan
<i>- Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	4	Laporan
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	12	Laporan
<i>- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi</i>	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i>	12	Laporan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	8	Komoditi
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	8	Pelaku Usaha
<i>- Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan</i>	8	Pelaku Usaha
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	9	Dokumen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2025	
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen	12	Kasus
- Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	6	BPSK
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	204	Dokumen
- Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	3	Komoditi
- Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	200	Dokumen
- Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	4	Sertifikat
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi	50	Pelaku Usaha
- Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12	Laporan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36	Dokumen
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	36	Dokumen
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12	Dokumen
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12	Dokumen
- Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	12	Dokumen
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi	1	Dokumen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2025
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi	1 Dokumen
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi :	1 Dokumen
	1) Industri Besar; dan	
	2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang	
	Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

♦ Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar (Bidang Koperasi & Usaha Kecil Menengah)

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Diskumperindag
(Bidang Koperasi & Usaha Kecil Menengah) Tahun 2025

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2025		Realisasi Capaian Kinerja 2025		Persentase (%)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Dinas Kumperindag	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penpeningkatan penataan kelembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas	100	%	100	%	100

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2025		Realisasi Capaian Kinerja 2025		Persentase (%)
		perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	10	Dok	10	Dok	100
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	4	Dok	100
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Lap	6	Lap	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan	87	Orang/Bulan	87	Orang/Bulan	100
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87	Orang/Bulan	87	Orang/Bulan	100
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	1	Lap	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	87	Orang	87	Orang	100
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	87	Orang	87	Orang	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	30	paket	18	paket	60
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	Paket	18	Paket	60
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Lap	1	Lap	100
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Lap	1	Lap	100

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2025		Realisasi Capaian Kinerja 2025		Persentase (%)
Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	20	Kop	18	Kop	90
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	20	Dok	18	Dok	90
	- Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20	Unit Usaha	22	Unit Usaha	110
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390	Orang	400	Orang	102,56
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	390	Orang	400	Orang	102,56
	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	390	Orang	400	Orang	102,56
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif	25	Unit Usaha	50	Unit Usaha	200
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	25	Unit Usaha	50	Unit Usaha	200

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2025		Realisasi Capaian Kinerja 2025		Persentase (%)
	- Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	25	Unit Usaha	25	Unit Usaha	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing	160	Unit Usaha	43	Unit Usaha	26,88
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	300	Unit Usaha	350	Unit Usaha	116,67
	- Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	300	Unit Usaha	350	Unit Usaha	116,67
	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	358	Orang	-	Orang	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	50	Unit Usaha	52	Unit Usaha	104

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2025		Realisasi Capaian Kinerja 2025		Persentase (%)
	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah	50	Unit Usaha	52	Unit Usaha	104
	- Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50	Unit Usaha	7163	Unit Usaha	14.326

♦ Urusan Pilihan (Bidang Perdagangan)

Tabel 2.3. Capaian Kinerja Urusan Pilihan (Perdagangan)
Diskumperindag Tahun 2025

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2025		Realisasi Capaian Kinerja 2025		Persentase (%)
Meningkatnya Nilai Ekspor	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi	1	Dok	1	Dok	100
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	10	Dok	74	Dok	740
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	10	Dok	74	Dok	740
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	28	Lap	28	Lap	100

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2025		Realisasi Capaian Kinerja 2025		Persentase (%)
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	16	Lap	16	Lap	100
	- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12	Lap	12	Lap	100
	- Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4	Lap	4	Lap	100
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	12	Lap	12	Lap	100
	- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12	Lap	12	Lap	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	8	Komoditi	8	Komoditi	100

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2025		Realisasi Capaian Kinerja 2025		Persentase (%)
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	8	Pelaku Usaha	20	Pelaku Usaha	250
	- Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	8	Pelaku Usaha	20	Pelaku Usaha	250
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	9	Dok	9	Dok	100
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen	12	Kasus	187	Kasus	1558,3
	- Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	6	BPSK	6	BPSK	100
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	204	Dok	112	Dok	54,9
	- Pemantauan Mutu Produk	Jumlah Produk Potensial yang Dipantau	3	Komoditi	2	Komoditi	66,7
	- Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	200	Dok	112	Dok	56
	- Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	4	Sertifikat	-	Sertifikat	-
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi	50	Pelaku Usaha	55	Pelaku Usaha	110

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2025		Realisasi Capaian Kinerja 2025		Persentase (%)
	- Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12	Lap	12	Lap	100

♦ Urusan Pilihan (Bidang Industri)

Tabel 2.4. Capaian Kinerja Urusan Pilihan (Industri)
Diskumperindag Tahun 2025

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2025		Realisasi Capaian Kinerja 2025		Persentase (%)
Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36	Dok	36	Dok	100
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	36	Dok	36	Dok	100
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12	Dok	12	Dok	100
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12	Dok	12	Dok	100
	- Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	12	Dok	12	Dok	100
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi	1	Dok	-	Dok	-

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2025		Realisasi Capaian Kinerja 2025		Persentase (%)
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi	1	Dok	-	Dok	-
	- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi : 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1	Dok	-	Dok	-
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah informasi industri & fasilitas pengolahan data industri	12	Dok	-	Dok	-
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12	Dok	-	Dok	-

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2025		Realisasi Capaian Kinerja 2025		Persentase (%)
	- Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12	Dok	-	Dok	-



c. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

1. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar (Bidang Koperasi & Usaha Kecil Menengah)

Tabel 2.5. Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2024 dan TA. 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persentase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2025		Realisasi Capaian Kinerja 2025		Persentase (%)	Ket
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390	Orang	475	Orang	121,8	390	Orang	400	Orang	102,56	
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	390	Orang	475	Orang	121,8	390	Orang	400	Orang	102,56	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	20	Koperasi	20	Koperasi	100	20	Koperasi	18	Koperasi	90	
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	20	Koperasi	20	Koperasi	100	20	Koperasi	18	Koperasi	90	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif	20	Unit Usaha	20	Unit Usaha	100	25	Unit Usaha	50	Unit Usaha	200	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20	Unit Usaha	20	Unit Usaha	100	25	Unit Usaha	50	Unit Usaha	200	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persentase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2025		Realisasi Capaian Kinerja 2025		Persentase (%)	Ket
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing	140	Unit Usaha	43	Unit Usaha	30,7	160	Unit Usaha	43	Unit Usaha	26,88	
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	250	Unit Usaha	525	Unit Usaha	210	300	Unit Usaha	350	Unit Usaha	116,67	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	40	Unit Usaha	52	Unit Usaha	130,0	50	Unit Usaha	52	Unit Usaha	104	
Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah	40	Unit Usaha	52	Unit Usaha	130,0	50	Unit Usaha	52	Unit Usaha	104	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100	%	100	%	100	100	%	100	%	100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Lap	1	Lap	100	1	Lap	1	Lap	100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	31	paket	18	paket	58,1	30	paket	18	paket	60	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	87	Orang	-	Orang	-	87	Orang	87	Orang	100	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persentase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2025		Realisasi Capaian Kinerja 2025		Persentase (%)	Ket
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	10	Dok	15	Dok	150	10	Dok	10	Dok	100	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	87	Orang/Bulan	79	Orang/Bulan	90,8	87	Orang/Bulan	87	Orang/Bulan	100	

2. Urusan Pilihan (Bidang Industri)

Tabel 2.6. Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2024 dan TA. 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persentase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2025		Realisasi Capaian Kinerja 2025		Persentase (%)	Ket
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36	Dok	36	Dok	100	36	Dok	36	Dok	100	
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	36	Dok	36	Dok	100	36	Dok	36	Dok	100	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah informasi industri & fasilitas pengolahan data industri	-	Dok	-	Dok	-	-	Dok	-	Dok	-	tidak teranggarkan di 2025
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	Dok	-	Dok	-	-	Dok	-	Dok	-	tidak teranggarkan di 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persentase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2025		Realisasi Capaian Kinerja 2025		Persentase (%)	Ket
berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)												
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi	1	Dok	1	Dok	100%	-	Dok	-	Dok	-	tidak teranggarkan di 2025
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi	1	Dok	1	Dok	100%	-	Dok	-	Dok	-	tidak teranggarkan di 2025

3. Urusan Pilihan (Bidang Perdagangan)

Tabel 2.7. Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2024 dan TA. 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2023		Persentase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2025		Realisasi Capaian Kinerja 2025		Persentase (%)	Ket
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	28	Lap	43	Lap	153,6	28	Lap	28	Lap	100	
Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi	16	Lap	43	Lap	268,8	16	Lap	16	Lap	100	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2023		Perse ntase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2025		Realisasi Capaian Kinerja 2025		Persen tase (%)	Ket
Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan											
Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	12	Lap	-	Lap	-	12	Lap	12	Lap	100	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	7	Dok	7	Dok	100	9	Dok	9	Dok	100	
Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang beredar dan/atau jasa sesuai parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	40	Pelaku Usaha	45	Pelaku Usaha	112,5	50	Pelaku Usaha	55	Pelaku Usaha	110	
Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen	11	Kasus	297	Kasus	2700,0	12	Kasus	187	Kasus	1558,3	
Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	153	Dok	145	Dok	94,8	204	Dok	112	Dok	54,9	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2023		Perse ntase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2025		Realisasi Capaian Kinerja 2025		Persen tase (%)	Ket
Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota												
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	7	Komoditi	8	Komoditi	114,3	8	Komoditi	8	Komoditi	100	
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	7	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	-	8	Pelaku Usaha	20	Pelaku Usaha	250	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi	2	Dok	1	Dok	50	1	Dok	1	Dok	100	
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	9	Dokumen	47	Dokumen	522,2	10	Dokumen	74	Dokumen	740	

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 2.8. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kumperindag Tahun 2023-2026 Sesuai RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

N O	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Koperasi Sehat	20 Koperasi	22 Koperasi	20 Koperasi	20 Koperasi	20 Koperasi	18 Koperasi	20 Koperasi	
2	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390 Orang	400 Orang	390 Orang	475 Orang	390 Orang	400 Orang	390 Orang	
3	Jumlah Koperasi Aktif	15 Unit Usaha	-	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	25 Unit Usaha	50 Unit Usaha	30 Unit Usaha	
4	Jumlah UKM yang berdaya saing	100 Unit Usaha	50 Unit Usaha	140 Unit Usaha	43 Unit Usaha	160 Unit Usaha	43 Unit Usaha	180 Unit Usaha	
5	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	30 Unit Usaha	50 Unit Usaha	40 Unit Usaha	52 Unit Usaha	50 Unit Usaha	52 Unit Usaha	60 Unit Usaha	
6	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36 Dok	36 Dok	36 Dok	36 Dok	36 Dok	36 Dok	36 Dok	
8	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	- (tidak teranggarkan di 2024)	1 Dok	- Dok	1 Dok	
9	Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri	12 Dok	12 Dok	12 Dok	- (tidak teranggarkan di 2024)	12 Dok	- Dok	12 Dok	
10	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi	2 Dok	8 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	
11	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	28 Laporan	28 Laporan	28 Laporan	43 Laporan	28 Lap	28 Lap	28 Lap	
12	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	6 Komoditi	7 Komoditi	7 Komoditi	8 Komoditi *	8 Komoditi	8 Komoditi	9 Komoditi	
13	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	5 Dok	5 Dok	7 Dok	7 Dok	9 Dok	9 Dok	11 Dokumen	

e. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program perencanaan dan pembangunan industri
8. Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
9. Program pengembangan ekspor
10. Program standarisasi dan perlindungan konsumen
11. Program Perizinan dan pendaftaran Perusahaan



BAB III

TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo menerima Tugas Pembantuan yaitu :

✚ Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia

1. Dasar Hukum

- ~ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- ~ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- ~ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi Nomor : SP DIPA-149.01.3.69452/2025 tanggal 06 Februari 2025

2. Program dan kegiatan

Dalam Pelaksanaan dekonsentrasi Tahun 2025 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mendapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp. 6.535.274.000,- melalui Program Perkoperasian dengan realisasi sebesar Rp. 5.146.222.763 atau 78, 75 % dan Sisa Anggaran Rp. 1.389.051.237,

Output kegiatan :

a. Pelatihan Pengurus KDKMP di Provinsi Gorontalo

yaitu terlaksananya 14 Pelatihan pengurus dengan jumlah peserta 1.462 orang dan 1 Pelatihan Pendamping dengan jumlah peserta 204 orang. Total jumlah Pelatihan 15 dan jumlah peserta 1.666 orang. Pelatihan Pengurus KDKMP dari target 1.462 orang yang terealisasi berjumlah 1.441 orang dan yang tidak mengikuti Pelatihan 21 orang.

1. Pelatihan KDKMP di Kota Gorontalo

25-27 Nopember 2025

Peserta 102 orang

2. Pelatihan KDKMP Kab. Gorontalo 1

	04-06 Nopember 2025	Peserta 100 orang
3. Pelatihan KDKMP Kab. Gorontalo 2	20-22 Nopember 2025	Peserta 100 orang
4. Pelatihan KDKMP Kab. Gorontalo 3	25 27 Nopember 2025	Peserta 89 orang
5. Pelatihan KDKMP Kab. Gorontalo 4	04-06 Desember 2025	Peserta 110 orang
6. Pelatihan KDKMP Kab. Boalemo 1	04-06 Nopemebr 2025	Peserta 82 orang
7. Pelatihan KDKMP Kab. Boalemo 2	01-03 Desember 2025	Peserta 82 orang
8. Pelatihan KDKMP Kab. Pohuwato 1	21-23 Nopember 2025	Peserta 100 orang
9. Pelatihan KDKMP Kab. Pohuwato 2	02-04 Desember 2025	Peserta 110 orang
10. Pelatihan KDKMP Kab. Bone Bolango 1	20-22 Nopember 2025	Peserta 94 orang
11. Pelatihan KDKMP Kab. Bone Bolango 2	25-27 Nopember 2025	Peserta 96 orang
12. Pelatihan KDKMP Kab. Bone Bolango 3	01-03 Desember 2025	Peserta 130 orang
13. Pelatihan KDKMP Kab. Gorontalo Utara 1	06-08 Nopember 2025	Peserta 100 orang
14. Pelatihan KDKMP Kab. Gorontalo Utara 2	04-06 Desember 2025	Peserta 146 orang

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo belum termasuk didalam standar pelayanan minimal.



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun Pelaporan 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Laporan ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja selama tahun 2025 dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan disamping untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007, juga merupakan perwujudan dari pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 pada beberapa program kegiatan telah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dan terdapat 1 (satu) program yaitu Perencanaan dan Pembangunan Industri yang belum mencapai target keuangan Berbagai capaian yang diraih menunjukkan kontribusi positif terhadap penguatan koperasi, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan daya saing industri, serta stabilitas dan kelancaran kegiatan perdagangan. Capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo, pemerintah kabupaten/kota, serta partisipasi aktif pelaku usaha dan masyarakat.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya, dinamika kondisi ekonomi, serta kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur dan pelaku usaha. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Melalui penyusunan LPPD ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam perumusan kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah selanjutnya. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo sepanjang tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gorontalo, Januari 2026
Kepala Dinas,

Fayzal Lamakaraka, S.STP, MM
NIP. 197707151996121001